

PROBLEMATIKA DALAM EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Robit Azam Jaysurrohman¹, Muhammad Supandi²,
Muhammad Tedi Wardani³, Muhaimi Puthaen⁴, Farid Setiawan⁵
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
robit1800031162@webmail.uad.ac.id

Abstract

An education policy implementation process cannot be separated from the need for special attention. The elements in it have several shortcomings that need improvement. Starting from the legitimacy, formulation, and implementation of the community. Of the three components above, formulation is the most critical initial stage in education policy making. The failure of a policy program usually starts from the management of inaccurate education policy formulations. Therefore, it is necessary to conduct an evaluation in order to avoid failure in education policy. Education policy evaluation serves to measure the quality of the expenditure of a policy and provide input to the parties involved.

Keywords: *Formulation, Policy, Evaluation*

Abstrak : Sebuah proses pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari perlunya mendapatkan perhatian yang khusus. Elemen-elemen yang ada di dalamnya terdapat beberapa kekurangan yang butuh memperoleh perbaikan. Mulai dari legitimasi, formulasi, dan implementasinya terhadap masyarakat. Dari ketiga komponen di atas, formulasi merupakan tahap awal yang paling genting dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Kegagalan suatu program kebijakan biasanya dimulai dari pengelolaan formulasi kebijakan pendidikan yang tidak akurat. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah evaluasi agar bisa menghindari kegagalan pada kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan berfungsi guna mengukur berapa besar dari kualitas pengeluaran sebuah kebijakan dan memberikan sebuah masukan kepada para pihak yang berada didalamnya.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan, Evaluasi

PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan pendidikan yakni sebuah aktivitas agar mengetahui sebuah kebijakan pendidikan itu betul-betul akan sesuai terhadap kriteria yang sudah ditentukan dan bisa memunculkan dampak nyata kepada khalayak sesuai terhadap yang diharapkan. Didalam prosesnya yang musti dijalankan pada implementasi analisis kebijakan pendidikan, supaya bisa dipahami apakah kebijakan itu bisa

terselenggara secara baik atau sebaliknya, dengan adanya perubahan atau perbaikan. Dan bisa mengetahui kekurangan atau kelebihan untuk kebijakan pendidikan itu apabila diterapkan. Semua dapat melihat dampak yang dimunculkan dari kebijakan pendidikan tersebut, akan menghadirkan manfaat atau memunculkan kegaduhan, kerugian serta lainnya. Pada tahapan manajemen sendiri, proses evaluasi adalah fase akhir dimana suatu proses penyusunan kebijakan yang bisa menciptakan rekomendasi supaya bisa menyempurnakan suatu kebijakan pendidikan itu.

Tentang sesuatu yang telah terjadi akibat dari pilihan serta penerapan kebijakan pendidikan itu. Bila dinilai perlu maka perubahan kepada kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan penilaian (evaluasi). Dengan mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah instrumen yang terpenting didalam sebuah kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang telah berjalan ataupun yang belum berjalan juga telah berhasil atau tidak sesuai terhadap yang dikehendaki atau tidak (Supandi, 1988).

Kebijakan pendidikan merupakan unsur akan kebijakan publik yang tidak dapat terlepas dengan sendirinya tanpa adanya sebuah evaluasi. Evaluasi kebijakana pendidikan yang dijalankan dalam menilai keefektifan serta wujud pertanggungjawabkan pada pelaksanaan pendidikan pada publik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan guna mengukur tingkat perbedaan diantara harapan serta realita. Evaluasi kebijakan pendidikan supaya dapat jadi sarana dalam menghimpun serta mengelola informasi tentang program atau pelayanan pendidikan, untuk menetapkan saran untuk perbaikan yang dibutuhkan guna penerapan kebijakan pendidikan terselenggara efektif sesuai terhadap standar yang ditentukan (Hasbullah:2015).

Biasanya evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebuah proses atau kegiatan yang dijalankan dengan berurutan, serta merupakan tahapan terakhir didalam proses analisis kebijakan (Islamy, 1994: Winarno, 2008). Akan tetapi, beberapa pakar menyatakan evaluasi kebijakan pendidikan bukan adalah fase terakhir akan proses kebijakan, dapat dijalankan ditengah proses analisis, berdasarkan pertimbangan program kebijakan condong pada suatu kegagalan atau kurang pada kesesuaian

terhadap tujuan yang dikehendaki. Sebab, kebijakan sering terjadi kegagalan dalam meraih maksud atau tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pernyataan diatas, bisa disimpulkan evaluasi kebijakan pendidikan yakni sebuah proses dalam menilai sejauh mana sebuah kebijakan pendidikan memberikan hasil dengan membandingkan diantara hasil yang didapat terhadap tujuan serta target atau perbandingan input terhadap output selaku aspek efisiensi dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi apabila di kerucutkan yang berkaitan terhadap hasil informasi tentang nilai atau manfaat akan hasil kebijakan yang pada kenyataannya memiliki nilai¹. Evaluasi merupakan sebuah aktivitas guna mengetahui seberapa jauh sebuah program yang sudah berjalan maupun belum berjalan serta telah berhasil atau juga gagal tidak sesuai terhadap harapan. Menurut Supandi, evaluasi yakni usaha menganalisa nilai-nilai dari fakta suatu kebijakan yang ada. Alhasil didalam hal ini tidak sekedar menghimpun fakta yang berhubungan dengan kebijakan, tetapi membuktikan fakta yang memiliki nilai atau tidak apabila dibandingkan terhadap standar yang sudah ditetapkan. Jones mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang disusun agar bisa menilai hasil-hasil dari program pemerintah menggunakan teknik pengukuran, metode analisisnya serta objeknya.²

Menurut Stufflebeam, evaluasi artinya sebuah proses pencarian, penggambaran serta pemberian informasi bermanfaat untuk menentukan sebuah alternatif keputusan. Dan menurut Anderson, evaluasi yakni suatu proses yang menentukan hasil yang sudah diraih dalam merencanakan untuk mendukung demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut Suharto, kebijakan yakni sebuah ketetapan yang

¹ Nanang Fattah. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 234.

² Ali Imron. 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia (Proses, Produk, dan Masa Depan)*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 86-87

menganut prinsip-prinsip dalam mengarahkan untuk berbuat yang telah dibuat dengan terstruktur demi meraih sebuah tujuan.³

Setelah mengetahui sejumlah definisi evaluasi menurut sejumlah pernyataan tersebut, maka penulis bisa menyimpulkan jika evaluasi yakni sebuah kegiatan yang dapat dilakukan dalam menilai serta mengukur suatu program dari seluruh aspek agar dapat mengetahui apakah didalam program tersebut telah terlaksana atau belum, dengan perencanaan serta harapan yang sesuai. Sedangkan evaluasi kebijakan sendiri merupakan sebuah penilaian terhadap hasil sebuah program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan pengertian evaluasi kebijakan pendidikan adalah penilaian serta pengukuran terhadap program pemerintah yang telah terfokus didalam ruang lingkup kependidikan dalam seluruh aspek.

B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat di perlihatkan dalam menunjukan pemicu dari kegagalan sebuah kebijakan, atau bisa mengetahui semua kebijakan pendidikan yang dilaksanakan serta dapat mendapat manfaat yang ingin dicapai. Dengan bahasa yang cukup sederhana, evaluasi kebijakan pendidikan ketika ingin menilai “manfaat” dari kebijakan pendidikan yang diaplikasikan. Atas itu semua, evaluasi kebijakan pendidikan dapat ditentukan menjadi 3 unsur yakni:

1. Administratif, adalah untuk mengukur dalam prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, umumnya lebih kepada bidang keuangan.
2. Politik, adalah untuk mengukur pertimbangan dalam politik dari kebijakan pendidikan itu sendiri.
3. Yudisial, adalah dalam mengukur semua objek-objek hukum, yang telah dilanggar atau tidak dilanggar (Putra: 2012).

Hal yang sama disampaikan, evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan jadi;

1. Dalam menilai keberhasilan serta kegagalan akan sebuah kebijakan yang berlandaskan kriteria dan standard yang sudah ditetapkan sebelumnya.

³ Rusmawati, Masjaya, Muhammad Noor, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Samarinda, Jurnal Administrative Refrom*, Vol 2, No 3, 2014, 1761.

2. Menentukan dampak yang diakibatkan dari kebijakan pendidikan dengan cara menggambarkan semua dampaknya (Lester dan Stewart, 2007).

Evaluasi Kebijakan pendidikan memiliki tujuan menurut Subarsono (2010, 120) menyatakan bahwasanya evaluasi kebijakan pendidikan sendiri mempunyai sejumlah tujuan.

1. Untuk mengukur seberapa tingkat efisiensi suatu kebijakan
2. Untuk menentukan seberapa tingkat kinerja sebuah kebijakan yang dimana lewat evaluasi kebijakan agar bisa mengetahui derajat pencapaian tujuan serta sasaran kebijakan itu.

C. Permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Semua dapat mengetahui bahwa didalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan segala sesuatu tidak terlepas dari yang namanya permasalahan dan hambatan yang banyak dialami, antara lain:

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya evaluasi seras *evaluator* kebijakan pendidikan
2. Kendala *politic* yaitu selalu terbentur sampai gagal akibat setiap kelompok saling menutupi kejelekan dari pelaksanaan sebuah program karena ada *bargaining* dan *deal* politik.
3. Masih kurangnya data serta informasi yang terbaru, karena data yang telah ada kualitasnya belum cukup baik serta suplay data masih saja dianggap pekerjaan rutin serta sekedar formalitas saja tanpa melihat muatannya.
4. Didalam kendala ekonomis sendiri hanya sedikit dalam biaya untuk mengumpulkan data serta pengolahan data. Ongkos bagi para staf administrasi serta bagi evaluator. Karena kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan sendiri semua pasti akan menghadapi kendala dan hambatan ketika tidak adanya dukungan finansial dari lembaga pendidikan.
5. Dalam kendala psikologis aktor yang menjadi pelaksana kegiatan telah memandang bahwa evaluasi kebijakan pendidikan sebagai hasil prestasi dari dirinya. Hal ini akan menjadi penghambat dari karir mereka untuk kedepannya. Karena faktor kondisi kenyamanan yang mereka miliki.

6. Masalah pada subjektivitas masalah dari perspektif orang yang berbeda yang mana mereka memiliki pandangan yang tidak sama juga dalam solusi masalah kebijakan.
7. Memiliki masalah dalam hubungan satu dengan yang lainnya ketika membutuhkan pemecahan yang sama.
8. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat yang menyulitkan dalam evaluasi kebijakan pendidikan dikarenakan sering kali masalah yang terjadi sekarang. Masalah yang tidak selaras lagi terhadap masa mendatang. Dan didepanya telah memunculkan masalah yang kompleks dan rumit.
9. Mengalami ketidakjelasan terkait dengan tujuan kebijakan pendidikan yang diakibatkan dari kompromi yang dipaksa oleh dalam langkah pertama pada pembuat kebijakan.

Berkenaan dengan pengukuran dalam evaluasi kebijakan pendidikan, menyangkut dalam pemakaian konsep tertentu selaku sebuah alat guna mengukur tingkat keberhasilan serta kegagalan sebuah program. Contohnya persoalan efektifitas sangat sulit jika dilihat terutama yang berkenaan tingkat kualitasnya. Kelompok sasaran yang harus diperhatikan yaitu program walaupun berakibat secara menyeluruh dalam populasi sasaran. Akan tetapi tidak semua mempunyai dampak pada kelompok sasaran. Namun sering terjadi bukan pada kelompok target yang mendapat manfaat akan kebijakan itu, namun kelompok lain pada populasi itu yang terkadang diakibatkan oleh *bias biokrasi* (Ali, M. 2017).

D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Didalam manfaat evaluasi tersebut bisa di klarifikasikan jadi dua aspek yaitu internal serta eksternal. Dimensi internal yang berkenaan para pihak yang ikut langsung untuk persiapan dan penerapan kebijakan serta manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Dapat mengetahui efektifitas sebuah kebijakan dengan penilaian suatu kebijakan apakah mencapai tujuannya atau belum.

2. Dapat mengetahui sebuah kebijakan yang dilaksanakan supaya memperoleh informasi yang akurat serta objektif. Apakah kebijakan tersebut sukses atau tidak.
3. Dapat menghindari pengulangan pada kesalahan dalam informasi dari evaluasi kebijakan yang mencukupi akan diberikan tanda-tanda supaya tidak terjadi kesalahan yang sama lagi pada pelaksanaan yang senada atau kebijakan yang lain dalam waktu mendatang (Hogwood and Peter, 1985).

Dimensi yang bersifat eksternal berhubungan terhadap para pihak yang sudah melihat secara langsung persiapan atau pun implementasi kebijakan. Akan tetapi, mereka menikmati manfaat dari evaluasi kebijakan pendidikan antara lain:

1. Agar bisa mensosialisasikan sebuah manfaat kebijakan terutama pada kelompok sasaran serta penerima secara terukur.
2. Dapat memenuhi prinsip yang akuntabilitas publik, merupakan penilaian yang dimana kinerja terhadap kebijakan yang sudah ditentukan adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari pengambilan kebijakan terhadap publik, baik itu terkait dengan langsung ataupun tidak. Evaluasi kebijakan pendidikan telah menghadirkan manfaat yang optimal dan sejumlah hal yang baik yang butuh diperhatikan: 1. *Political feasibility*. 2. *Social acceptability*. 3. *Administrative feasibility*. 4. *Effectiveness*. 5. *Practical Considerations*. 6. *Liberty/freedom*. 7. *Security*. 8. *Equity/equality*. 9. *Efficiency*. 10. *Goals/values* (Yuyanshi, 2016).

E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Didalam memonitoring yaitu dikumpulkan semua data serta analisis. Nah hasil dari analisis diinterpretasikan serta didefinisikan selaku masukan bagi para pemimpin agar melakukan perbaikan (Kemendikbud, 2013). Monitoring sendiri adalah prosedur kebijakan pendidikan yang digunakan agar dapat menghasilkan informasi terkait sebab akibat keputusan-keputusan yang bisa mencerminkan antara hubungan pelaksanaan program kebijakan atau outcome terhadap sumber daya pokoknya merupakan wawasan mengenai pelaksanaan kebijakan. Pimpinan melakukan monitoring guna melihat serta memonitoring jalannya organisasi sepanjang berlangsungnya kegiatan serta menilai perwujudan dari tujuan, dengan

melihat faktor penunjang serta penghambat pelaksanaan program. Pada pengawasan evaluasi kebijakan pendidikan mendapat hubungan yang premis faktual sebuah kebijakan, yaitu dengan bergerak mundur seperti apa yang dilihat saat ini agar menggambarkan sesuatu yang sudah tercipta sebelumnya. Monitoring sendiri bisa berfungsi sebagai a. penjelasan dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat membantu untuk menerangkan bagaimana dampak dari kebijakan atau mengapa antara perencanaan tidak serasi. b. laporan dapat menciptakan informasi yang mampu untuk menghitung hasil dari perubahan sosial pada masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan suatu jangka waktu tertentu. c. pemeriksaan merupakan cara untuk menetapkan apakah layanan dan sumber dari pendidikan yang telah diberikan sudah mencapai sasaran dan target. d. ketaatan dapat menentukan tindakan administrator semua staf yang terlibat dalam mengikuti standar serta prosedur yang telah ditentukan (Wibawa, 1994: Wiliam N. Dunn, 2003).

Memang secara prinsip memonitoring yang dijalankan untuk sementara dalam kegiatan telah berlangsung untuk memastikan keselarasan proses dalam mencapai target sesuai dengan rencana atau tidak. Nah untuk itu, monitoring harus dijalankan secara baik untuk memastikan dalam penerapan kebijakan pendidikan apakah ada dalam jalurnya yang sesuai terhadap pedoman serta penyusunan program serta bisa memberikan sebuah informasi terhadap pengelola program dan jika terjadi sesuatu seperti hambatan atau penyimpangan dan selaku masukan untuk mengadakan evaluasi.

F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan

Didalam kriteria sebuah evaluasi kebijakan pendidikan untuk menggunakan pandangan William N Dunn (2003), beberapa unsur yang tidak memenuhi yaitu: a. daya guna, didalam evaluasi sendiri musti dapat menyediakan informasi yang bisa dimengerti serta dapat digunakan oleh pengambil keputusan serta pelaku dalam kebijakan lainnya. b. Ketepatan waktu, sebuah evaluasi musti dapat membuat informasi tersedia dalam waktu keputusan yang musti dibuat. c. obyektifitas, evaluasi musti bisa dilaporkan melalui kesimpulan serta informasi penunjang yang sempurna atau tidak bias merupakan informasi yang membikin para evaluator bisa mendapat

kesimpulan yang mirip. d. reliabilitas, disini evaluasi musti bermuatan bukti dengan kesimpulan yang tidak mengacu terhadap informasi lewat prosedur pengukuran yang tidak konsisten serta teliti. e. validitas, evaluasi dalam memberika pertimbangan secara persuasif serta seimbang dalam mengenai hasil nyata dari sebuah program atau kebijakan. f. signifikan, evaluasi ketika memberikan informasi yang penting dan baru untuk pelaku kebijakan agar beranjak lebih yang mereka selama ini nilai terang serta jelas. g. relevansi, evaluasi memberikan informasi relevan dengan semua kebutuhan dalam penentuan keputusan kebijakan yang lainnya serta harus ampu menjawab semua pertanyaan dengan benar dalam waktu yang pas nantinya (William N Dunn, 2003).

Untuk menyempurnakan dari pandangan William N Dunn (2003) terkait kriteria dalam evaluasi kebijakan pendidikan yang baik serta bisa memperhatikan beberapa hal juga yaitu: a. ketepatan dari hasil yang telah didapat apakah bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang telah dijalankan. b. responsivitas, apakah dari hasil kebijakan pendidikan dapat berisikan preferensi dan nilai kelompok tersebut. c. pemerataan, apakah dari evaluasi biaya serta manfaat dari layanan pendidikan tersebut sudah didistribusikan dengan merata terhadap semua kelompok masyarakat yang berbeda. d. kecukupan, melihat sejauh mana hasil yang sudah tercapai yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan yang di evaluasi. d. efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai atau tidak (Subarsono, 2013).

G. Model dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Dalam model evaluasi kebijakan dibidang pendidikan dapat menggunakan pendekatan yang memakai didalam evaluasi kebijakan publik, nah disini terdapat sejumlah model yang bisa diaplikasikan serta juga bisa guna mengevaluasi kebijakan pendidikan, yakni: a. *discrepancy model*, yang dipopulerkan oleh Provus. b. CIIP *evaluation model* yang dipopulerkan oleh Stufflebeam. c. *CSE-UCLA evaluation model*, yang memfokuskan “kapan” evaluasi akan diadakan. d. *responsive evaluation model*, yang dikembangkan Stake. e. *countenance evaluation model*, yang dikembangkan Stake. f. *formatif-sumatif evaluation model*, yang dikembangkan Michael Scriven. g. *goal oriented evaluasi model*, yang dikembangkan Tyler, yaitu objek dari model tersebut merupakan tujuan akan program yang sudah ditetapkan sebelum program berlangsung serta saat

evaluasi dijalankan dengan berkelanjutan. h. *goal free evaluation model*, yang dikembangkan oleh Scriven, namun model ini bertolak belakang terhadap model yang pertama serta dapat dinyatakan jika evaluasi lepas dari tujuan khusus, karena pandangan Scriven yang musti diperhatikan yakni penampilan dari setiap langkah program. Model ini sangat memperhatikan tujuan umum yang hendak didapat oleh program bukan dari penilaian dengan detail (Kaufman serta Thomas pada Arikunto dan Cepi Safruddin, 2007).

Menjalankan banyak macam model evaluasi kebijakan pendidikan diatas, maka terdapat sejumlah pendekatan yang dapat dipakai yaitu: a. evaluasi formal, merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan dengan memakai metode deskriptif agar menciptakan informasi yang valid serta terpercaya terkait hasil dari kebijakan berlandaskan target program kebijakan yang sudah diterapkan secara formal oleh penyusun kebijakan pendidikan tersebut. Dalam asumsinya yaitu dengan sasaran serta target yang telah ditentukan secara formal adalah parameter yang pas guna melihat nilai serta manfaat dari semua program serta juga kebijakan pendidikan. b. evaluasi keputusan teoritis, yang mana pendekatan ini suatu evaluasi kebijakan pendidikan yang memakai metode deskriptif supaya membuahkan mengenai informasi pendidikan yang bisa dipercaya juga valid berkenaan hasil dari kebijakan pendidikan yang dengan tersembunyi diharapkan oleh sejumlah pemangku kepentingan pendidikan. Oleh sebab itu, keputusan evaluasi teoritik pasti berupaya agar menetapkan sasaran juga tujuan yang tersirat atau dinyatakan oleh para stakeholder pendidikan. c. evaluasi semu, bisa dinyatakan dalam mengadakan evaluasi kebijakan pendidikan bisa memakai metode deskriptif guna membuahkan informasi yang terpercaya serta valid terkait hasil kebijakan yang ada pada bidang pendidikan, tanpa bersusah payah menanyakan nilai atau manfaat akan hasil kebijakan pendidikan dalam setiap orang, kelompok dan masyarakat. Dengan asumsi yang dipakai yaitu tentang ukuran nilai dan manfaat adalah sesuatu yang telah terbukti secara otomatis dan tidak kontroversial (William N Dunn, 2003: 612-634).

H. Langkah dan Dampak Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Untuk mengadakan evaluasi kebijakan pendidikan, terdapat sejumlah langkah yang dapat diterapkan yaitu: 1. Dalam menentukan tujuan dari evaluasi kebijakan pendidikan yang diadakan dengan mengajukan dari sejumlah pertanyaan sebagai berikut: a. menentukan dalam perubahan yang dievaluasi adalah dampak akan kegiatan evaluasi atau sebab pemicu dari faktor yang lain. b. pengukuran pada perubahan tingkatan dari evaluasi pendidikan. c. deskripsi dan standarisasi dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan. d. siapa target akan evaluasi pendidikan. e. kapan target untuk perubahan kebijakan pendidikan. f. apa itu hakikat serta tujuan evaluasi pendidikan (Edward A. Schuman dalam Budi Winarno, 2012).

Evaluasi dari dampak kebijakan pendidikan dapat diadakan secara dengan jika program serta proses dari evaluasi kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dengan lengkap serta berjalan pada waktu sesuai terhadap apa yang direncanakan. Kebijakan pendidikan mampu diketahui dampak jika telah diterapkan pada masyarakat dan pada objeknya. Dari semua proses-proses evaluasi kebijakan pendidikan kita dapat mengetahui dampak dari kebijakan pendidikan yang tidak sama terhadap evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Berkaitan dengan dampak evaluasi kebijakan pendidikan ada empat dimensi yaitu: a. akumulasi dampak. b. hubungan dampak antara yang sesungguhnya terhadap dampak yang hendak dicapai. c. Kualitas kehidupan. d. pembuatan keputusan. e. sistem politik. f. waktu serta tipe dampak dari kesejahteraan ekonomi (Ripley, 1985).

Didalam dampak evaluasi kebijakan pendidikan sangat bersifat *ilmiah* dan cenderung mengesampingkan realita. Nah sehingga mengakibatkan munculnya beberapa yang mengandung kelemahan yaitu indikator dari evaluasi kebijakan pendidikan yang baik yang telah diadakan dengan mempertimbangkan beberapa hal: a. ketepatan. Dari hasil yang dicapai apakah dapat berguna dari evaluasi pendidikan yang telah dijalankan. b. responsivitas, hasil dari kebijakan pendidikan apakah dapat memuat preferensi serta nilai kelompok terkait yang bisa memuaskan mereka. c. pemerataan, dari biaya dan manfaat dari layanan pendidikan apakah didistribusikan secara merata pada semua kelompok masyarakat yang berbeda. d. kecukupan, melihat seberapa jauh hasil yang sudah didapat sehingga mampu menyelesaikan masalah

pendidikan yang akan dievaluasi. e. efektifitas, dari hasil yang diinginkan apakah sudah tercapai atau belum (Nugroho, 2009, Subarsono, 2013).

KESIMPULAN

Evaluasi adalah proses akhir dari suatu proses kebijakan, adalah penilaian tentang apa yang sudah terjadi selaku dampak pilihan serta penerapan kebijakan, serta jika dinilai perlu, bisa diperlukan perubahan terhadap kebijakan yang sudah diterapkan. Evaluasi kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah alat guna menghimpun serta mengelola informasi tentang program atau pelayanan yang diterapkan.

Evaluasi ada aktivitas yang musti dijalankan pada pelaksanaan sebuah kebijakan supaya diketahui apakah kebijakan itu bisa terselenggara secara baik ataukah tidak, mengetahui kekurangan serta keunggulan kebijakan itu, mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan, mengetahui akibat yang dimunculkan dari kebijakan itu serta mengetahui langkah berikutnya pada penangananan kebijakan itu ataukah diubah atau diperbaiki. Evaluasi adalah proses akhir dari suatu proses penyusunan kebijakan, yang membuahkan saran-saran guna memperbaiki kebijakan atau perumusan kebijakan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2007. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Depdiknas, 1998. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Dunn, William N., 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hogwood, B. W., & Peters, B, G. 1985. *The Pathology of public policy*. USA: Oxford University Press
- Islamy, Irfan M. 2003. *Prinsi-prinsip perumusan kebijakan negara*, Jakarta: Penerbit bumi aksara.
- Imron, Ali. 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia (Proses, Produk, dan Masa Depan)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jones. 1985. *School Finance: Technique and Social Policy*. London Coller Macmillan Pub.
- Kawengian, D.D., & Rares, J.J. 2005. Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak di kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Acta Diurna*, 4(5).
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2003. *Petunjuk Teknik Monitoring Dan Evaluasi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ripley, R. B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Shi, Yuyan. 2006. *Selecting Evaluation Criteria and Evaluating Policy*, San Diego: University of California.
- Stewart, Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. 2007. *Publik Policy: An Evolutionary Approach*. Nelson Education.
- Stufflebeam, 1985. *Systematic Evaluation*, Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Supandi, Ahmad Sanusi. 1988. *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK
- Wirawan, 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah.